

INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA PERUBAHAN RENSTRA 2019-2024

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

1. INSTANSI : **BIRO HUMAS DAN PROTOKOL**
2. TUJUAN : **Meningkatkan Kualitas Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama**
3. TUGAS : menyiapkan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang hubungan masyarakat, tugas-tugas keprotokolan dan administrasi kerjasama.
4. FUNGSI :
 1. pelaksanaan Juru Bicara Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
 2. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang hubungan masyarakat, protokol dan administrasi kerjasama;
 3. pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pengumpulan dan penyaringan informasi, media, dokumentasi, protokol dan administrasi kerjasama;
 4. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengumpulan dan penyaringan informasi, media, dokumentasi, protokol dan administrasi kerjasama;
 5. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang hubungan masyarakat, protokol dan administrasi kerjasama; dan
 6. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Layanan Kehumasan, Keprotokolan dan Kerjasama	Persentase Dokumen Monitoring Media yang disebarluaskan (%)	<p>Persentase Dokumen Monitoring Media Tentang Isu Aktual Pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang disebarluaskan dihitung sebagai berikut :</p> $\frac{\text{Jumlah yang disebarluaskan}}{\text{Jumlah total dok monitoring}} \times 100\%$ <p>Isu Aktual adalah berita yang disebarluaskan melalui media massa secara massif pada saat kondisi / kejadian / kebijakan terkait dengan isi berita tersebut sedang berkembang dan menjadi perhatian masyarakat, sehingga berita tersebut memiliki nilai informasi yang tinggi. Isu Aktual berita media massa menjadi sangat penting untuk dikumpulkan/diorganisir dan diketahui karena memiliki tendensi yang negatif untuk pihak yang berkepentingan, sehingga dapat dilakukan tindaklanjut dengan cepat agar berita dengan tendensi negatif tidak semakin berkembang di masyarakat.</p> <p>Kegiatan monitoring isu aktual berita media cetak dilakukan setiap pagi hari di hari kerja, dengan sasaran berita-berita tentang isu aktual pemerintahan Provinsi Jawa</p>	Media Online dan Media Cetak Harian	Bagian PPI

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		<p>Timur berdasarkan kategori Ekonomi, Pembangunan, Kesejahteraan Rakyat, Pemerintahan dan Umum.</p> <p>Jumlah monitoring isu aktual Berita Media Online dan Media Cetak dihitung berdasarkan jumlah berita yang diangkat oleh petugas setiap hari dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen monitoring media cetak harian.</p> <p>Hasil monitoring berita media cetak tersebut kemudian disediakan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Asisten Administrasi Umum untuk dibaca dan apabila diperlukan dilakukan tindaklanjut dengan memberikan solusi/clarifikasi. Hasil monitoring berita media cetak yang perlu ditindaklanjuti diberikan disposisi oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah.</p>		
	Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Produk Informasi (IKM)	<p>Kepuasan Penerima Produk Informasi diukur dengan menggunakan rumus Indeks Kepuasan Masyarakat berikut:</p> $\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Nilai Unsur}}{\text{Indeks Unsur}} \times 25$ <p>Produk Informasi yang dihasilkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Majalah Prasetya (Bulanan); 2. Buku Himpunan Pidato Gubernur; 3. Buku Himpunan Pidato Wagub dan Sekda; 4. Buku Himpunan Foto Kegiatan Gubernur; 5. Buku Himpunan Foto Kegiatan Wakil Gubernur; dan 6. Tayangan Kaleidoskop. <p>Selanjutnya produk informasi tersebut didistribusikan kepada 60 SKPD Provinsi Jawa Timur, 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dan 33 Provinsi se-Indonesia dengan Jumlah penerima sebanyak 131.</p>	SKPD, Provinsi dan Kab/Kota	- Bagian Media dan Dokumentasi
	Indeks Kepuasan Pejabat Negara dan OPD Penerima Layanan Keprotokolan (IKM)	perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan rumus perhitungan sebagai berikut:	Pejabat Negara dan OPD Pemprov Jatim	Bagian Protokol
		$\frac{\text{Jumlah Rata-Rata Nilai Unsur}}{\text{Indeks Unsur}} \times 25$		

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
		<p>Layanan Keprotokolan yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol Biro Humas dan Protokol adalah untuk semua kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dan untuk Pejabat Negara (Presiden, Wakil Presiden, DPR-RI dan DPD-RI) yang melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur.</p> <p>Jumlah layanan keprotokolan untuk kegiatan Gubernur Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dalam satu tahun rata-rata sebanyak 467 kegiatan, sedangkan kunjungan kerja pejabat negara yang dilayani rata-rata sebanyak 40 Kegiatan. Dari jumlah layanan keprotokolan dalam satu tahun tersebut, sebanyak 130 kegiatan yang dijadikan sampel</p>		
	Persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti (%)	<p>Perhitungan persentase Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama yang ditindaklanjuti sebagai berikut :</p> $\frac{\text{Jumlah yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total dok kerjasama}} \times 100\%$ <p>Tindaklanjut sebagaimana dimaksud adalah pelaksanaan program/kegiatan yang telah tertuang pada dokumen kesepakatan maupun perjanjian kerjasama, disamping itu tindaklanjut atas pelaksanaan program/kegiatan tersebut juga dilakukan dalam bentuk Monitoring Evaluasi dan Pengendalian Kerjasama.</p>	Dokumen Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Luar Negeri/Dalam Negeri	Bagian Administrasi Kerjasama